

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KINERJA PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA DENGAN KETAATAN REGULASI SEBAGAI
VARIABEL INTERVENING**

(Studi Pada Desa di Kabupaten Gunung Kidul)

MUSFIRA ULFA

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jeblog rt 03, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Email : musfiraulfa28@gmail.com

ABSTRACK

This study aims to test empirically determinants of village financial mangement, which consists of the village officers' capacity, supervision quality of Badan Permusyawaratan Desa (BPD), the utilization of information technology and The Regulations Obedience as intervening variables. The object in this study is village in Gunung Kidul Regency and the subject of this research is the establishment of the village in the village in the Regency of Gunung Kidul. The data in this study is the primary data obtained with the instrument in the form of a questionnaire. Number of questionnaires distributed to respondents as much as 117 questionnaires with result of 108 questionnaires can be processed. Analysis tool used was SPSS 15.0.

Based on the analysis that has been done the results obtained that the village officers' capacity and the utilization of information technology a positive effect against the regulations obedience, whereas the supervision quality of Badan Permusyawaratan Desa (BPD) has no effect against the observance of the regulation. To the village officers' capacity and the supervision quality of Badan Permusyawaratan Desa (BPD) influential positive on village financial management performance while the utilization of information technology does not affect the village financial management performance. While the regulations obedience cannot be intervening the village officers' capacity and supervision quality of Badan Permusyawaratan Desa (BPD) but can be intervening the utilization of information technology on performance of village financial management performance.

Keywords: Village Officers' Capacity, Supervision Quality of Badan Permusyawaratan Desa (BPD), the utilization of information technology , Village Financial Management Performance and The Regulations Obedience.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kapasitas perangkat desa yang memadai berfungsi untuk membantu pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa yang terdepan untuk urusan kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa. Alokasi Dana Desa (ADD) aparatur desa dibimbing untuk mengelola pemerintah dan dibekali dengan dana transfer langsung dari pemerintah pusat. Dalam APBN 2018, anggaran ADD dialokasikan sebesar Rp 81 triliun. Permasalahan pengelolaan dana desa yang tidak efisien dan efektif telah menjadi sorotan publik. Kasus penyelewengan dan korupsi dana desa juga telah banyak mencuat di media massa. Lemahnya pengelolaan dana desa ini tampaknya bersifat sistematis yang dikonfirmasi oleh hasil kajian sejumlah kajian evaluasi sejumlah institusi pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Guna meminimalisir penyelewengan dan mengoptimalkan dana desa tersebut diperlukan peningkatan kapasitas pengelola keuangan desa serta pembenahan regulasi yang meliputi berbagai aspek mulai dari perencanaan, pengelolaan, pengawasan serta evaluasi. Untuk pengendalian dan pengawasan maka aparat pengawas seharusnya bekerja secara optimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yaitu Inspektorat Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan dan terhadap pelaksanaan anggaran dana desa. Baik dari pelaksanaan yang sesuai aturan swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat untuk menumbuhkan ekonomi desa yang harus konsisten. Pelaksanaan program dan kegiatan yang menggunakan alokasi dana desa harus sesuai dan tidak boleh keluar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Dari sisi pengawasan ada pada kepatuhan membayar pajak dari setiap transaksi dana desa yang berkesinambungan.

B. Batasan Masalah Penelitian

1. Variabel independen yang diteliti adalah kapasitas aparatur desa, kualitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketaatan regulasi dan pemanfaatan teknologi informasi.
2. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kinerja pengelolaan keuangan desa.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah Kapasitas Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap Ketaatan Regulasi?
2. Apakah Kualitas Pengawasan BPD berpengaruh positif terhadap Ketaatan Regulasi?

3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa?
4. Apakah Kapasitas Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa?
5. Apakah Kualitas Badan Permusyawaratan Desa berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa?
6. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa?
7. Apakah Ketaatan Regulasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa?
8. Apakah Ketaatan Regulasi sebagai variabel intervening dapat memediasi pada pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa?
9. Apakah Ketaatan Regulasi sebagai variabel intervening dapat memediasi pada pengaruh Kualitas Pengawasan BPD terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa?
10. Apakah Ketaatan Regulasi sebagai variabel intervening dapat memediasi pada pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa?

Landasan Teori

1. Teori Stewardship

Hubungan *stewardship theory* dengan penelitian ini yaitu terletak pada masyarakat desa sebagai *principals* menyerahkan pengelolaan sumber daya atau pengelolaan keuangan desa kepada pemerintah desa sebagai *stewards*. Aparatur desa sebagai pihak di dalam pemerintah desa diharapkan dapat menjalankan pemerintahan dengan baik sesuai peraturan pemerintah desa guna tercapainya pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Tercapainya tujuan dari desa didukung dengan penggunaan keuangan desa yang memadai dan dikelola dengan baik sesuai kebutuhan desa oleh aparatur desa.

2. Teori Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan

dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang handal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku.

3. Sistem Informasi

Bodnar dan Hopwood (2006) mengatakan informasi merupakan suatu data yang diorganisasi yang dapat mendukung ketepatan pengambilan keputusan. Sistem informasi merupakan kumpulan peralatan dan manusia (sumber daya) yang dibuat untuk mengubah data-data ke dalam bentuk yang bermanfaat bagi pengguna dan berguna bagi pemakainya. Sistem informasi pada dasarnya adalah sekelompok unsur, yang saling terkait satu dengan yang lainnya, sehingga dapat memproses data transaksi yang dibutuhkan yang berfungsi bersama untuk mencapai suatu tujuan.

A. Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa terhadap Ketaatan Regulasi

Dengan adanya peraturan tersebut akan membuat perangkat desa dalam mengelola keuangan desa agar lebih transparan, akuntabel, partisipatif dan tertib serta disiplin anggaran. Teori stewardship menjelaskan situasi dimana manajemen lebih mementingkan kepentingan organisasi sebagai tujuan utama dibandingkan dengan kepentingan individu. Semakin baik kemampuan aparaturnya desa dalam mewujudkan kinerja pengelolaan keuangan desa yang baik maka akan tercapai tujuan utama pada organisasi tersebut untuk pengembangan dengan tujuan memajukan organisasi yang diharapkan. Prasetyo dan Muis (2015) Sumber daya manusia berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Penelitian Jalil (2017) bahwa sumber daya manusia pada pemerintah desa sangat penting dalam keberhasilan pengelolaan dana desa.

H₁ :Kapasitas Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap Ketaatan Regulasi

2. Pengaruh Kualitas Pengawasan BPD terhadap Ketaatan Regulasi

Teori sistem pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan penekanan penggelapan. Semakin bagus kualitas pengawasan BPD terhadap suatu obyek seperti laporan keuangan pada suatu organisasi maka akan semakin menjamin pengawas BPD menaati hukum dan peraturan yang berlaku pada organisasi tersebut. Menurut penelitian Munti dan Fahlevi (2017) menjelaskan bahwa kualitas

pengawasan BPD mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa. Prasetyo dan Muis (2015) BPD berpengaruh terhadap penguatan dalam pengawasan terhadap aparatur desa dalam mengelola keuangan desa guna tercapainya pengelolaan keuangan desa yang baik.

H₂ :Kualitas Pengawasan BPD berpengaruh positif terhadap ketaatan regulasi.

3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Ketaatan Regulasi

Pemanfaatan internet sebagai media untuk mempermudah dalam mengakses keuangan desa tentunya membutuhkan komputernisasi yang memadai di setiap desa. Dijelaskan dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang desa bahwa kepala desa memiliki tugas untuk memanfaatkan teknologi yang tepat guna dalam menjalankan program, prioritas, kegiatan dan kebutuhan dalam pembangunan di desa. Pengaturan pengelolaan keuangan desa harus memenuhi asas-asas sesuai dengan yang tercantum dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 menurut aparatur desa untuk bekerja sesuai kebijakan dan rencana yang telah dibuat antara pemerintah dan masyarakat.

H₃ :Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Ketataan Regulasi.

4. Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

Melihat kewenangan dan tugas dari aparatur desa, aparatur desa berperan sebagai *steward* dalam pemerintah desa dengan kata lain aparatur desa menjadi peran utama dalam pengelolaan keuangan desa. Pemahaman dan kemampuan aparatur desa sangat dibutuhkan untuk tercapainya tujuan dari pengelolaan keuangan desa. Tujuan dari pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan pembentukan UU tentang desa yaitu peningkatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Keberhasilan wewenang dan tugas dari aparatur desa mengindikasikan bahwa kapasitas aparatur desa tersebut memiliki kapasitas yang memadai dalam pengelolaan keuangan desa.

H₄: Kapasitas Aparatur Desa pengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

5. Pengaruh Kualitas Pengawasan BPD terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

Kedudukan BPD dalam struktur pemerintah desa adalah sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa. Kinerja pengelolaan keuangan menjelaskan pengaturan desa ditunjukkan untuk membantu mengembangkan aset desa yang baik dari budaya apapun yang berasal dari sumber daya manusianya untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan ketahanan serta perekonomian desa. Fungsi pengawasan BPD membuat aparat desa akan lebih transparan dalam menggunakan anggaran keuangan desa, sehingga dapat meminimalisir kesalahan penggunaan anggaran dan penyelewengan desa dan penggunaan keuangan desa dapat bekerja tepat sasaran. Prasetyo dan Muis (2015) BPD berpengaruh terhadap penguatan dalam pengawasan terhadap aparat desa dalam mengelola keuangan desa guna tercapainya pengelolaan keuangan desa yang baik.

H₅ : Kualitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

6. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Teknologi informasi akan mempermudah dalam mengelola keuangan desa serta meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa dengan pembuatan laman yang menyediakan laporan keuangan desa misalnya penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintah desa membantu aparat desa untuk pembuatan laporan keuangan desa lebih akuntabel dengan menggunakan komputer. Penggunaan komputer atau aplikasi dalam pembuatan laporan keuangan akan menyajikan laporan keuangan yang lebih detail dan dapat meminimalisir kesalahan penyajian.

H₆ : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

7. Pengaruh Ketaatan Regulasi terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

Permasalahan pada laporan keuangan masih cukup banyak seperti kurangnya partisipasi dari masyarakat, laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa tidak sesuai standar dan rawan terjadinya manipulasi, transparansi penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa yang masih rendah serta batas waktu pengelolaan keuangan desa yang sulit dipatuhi desa. Permasalahan tersebut dapat di atasi dengan berlandaskan pada pedoman Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban yang dapat diterapkan pada pengelolaan keuangan desa. Laporan keuangan desa yang dibuat secara konsisten dan tepat waktu serta pencatatan dilakukan sesuai dengan jumlah di lapangan membantu perumusan

anggaran desa periode selanjutnya untuk pengambilan keputusan strategis pada pengelolaan keuangan desa.

H₇ : Ketaatan Regulasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

8. Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa dengan Ketaatan Regulasi sebagai variabel intervening.

Hasil penelitian dari Munti dan Fahlevi (2017) menjelaskan kapasitas aparatur desa dan ketaatan regulasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Aparatur desa yang memiliki kapasitas yang baik harus memiliki pemahaman yaitu paham dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok, keterampilan yaitu terampil dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok serta kemampuan yaitu mampu dalam menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan desa sehingga tercapainya kinerja pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar.

H₈ : Kapasitas Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa dengan Ketaatan Regulasi sebagai variabel intervening.

9. Pengaruh Kualitas Pengawasan BPD terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa dengan Ketaatan Regulasi sebagai variabel intervening.

Fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja aparatur desa khususnya kepala desa menjadi kunci kepercayaan masyarakat dan penting dalam terlaksananya rencana desa yang telah disepakati bersama dalam APBDes dalam pengelolaan keuangan. Dengan adanya peraturan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 menuntut aparatur desa untuk bekerja sesuai kebijakan dan rencana yang telah dibuat antara pemerintah dan masyarakat, sehingga hasil yang diperoleh akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga BPD harus melakukan penguatan dalam pengawasan terhadap aparatur desa dalam mengelola keuangan desa guna tercapainya pengelolaan keuangan desa yang baik.

H₉ : Kualitas Pengawasan BPD berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa dengan Ketaatan Regulasi sebagai variabel intervening.

10. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa dengan Ketaatan Regulasi sebagai variabel intervening

Dengan adanya UU No.6 Tahun 2014 tentang desa bahwa kepala desa memiliki tugas untuk memanfaatkan teknologi yang tepat guna dalam menjalankan program, prioritas, kegiatan dan kebutuhan dalam pembangunan di desa. Dengan adanya ketaatan regulasi yang mencakup asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa yang harus diterapkan disetiap kegiatan dan pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Maka akan semakin bagus pula aparatur desa memanfaatkan teknologi informasi untuk pengelolaan keuangan desa maka akan semakin bagus juga kinerja aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa.

H₁₀ : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa dengan ketaatan regulasi sebagai variabel intervening.

METODE PENELITIAN

A. Obyek/subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada desa yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Seluruh desa di Kabupaten Gunung Kidul sebanyak 144 desa menjadi populasi dalam penelitian ini. Sampel penelitian ini diambil dari sebagian populasi dengan cara *cluster random sampling*.

B. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang didapatkan dari obyek penelitian melalui pengisian kuesioner yang dibagikan kepada responden.

C. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *cluster random sampling*. Dari total 144 populasi maka 36 desa akan dijadikan sampel dalam penelitian ini. Setiap sampel desa akan diwakili oleh 3 responden yang berkaitan langsung dalam pengelolaan keuangan desa sebagai aparatur desa. Responden yang mewakili desa diantaranya kepala desa, sekteratis desa dan kepala urusan keuangan desa.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data pada penelitian ini didapatkan dari penyebaran kuesioner kepada perwakilan dari seluruh sampel desa yang berada di Kabupaten Gunung Kidul. Kuesioner yang diberikan peneliti kepada responden merupakan jenis kuesioner tertutup dan pertanyaan positif dengan alternatif jawaban yang telah disediakan oleh peneliti dalam bentuk skala likert 1 sampai dengan 5. Dengan alternatif jawaban yang disediakan peneliti adalah

(STS) sangat tidak setuju, (TS) tidak setuju, (N) netral, (S) setuju, dan (SS) sangat setuju.

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

a. Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Untuk mengukur variabel ini menggunakan indikator efisiensi, efektifitas, ekonomis dan pelaporan yang memadai dalam pengelolaan keuangan (Mardiasmo, 2009). Pembuatan operasional variabel kinerja pengelolaan keuangan desa pada penelitian ini menggunakan item pernyataan kuesioner yang sudah pernah digunakan oleh Munti dan Fahlevi (2017) pada penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bireuen Aceh. Penelitian melakukan modifikasi penggunaan kata pada salah satu item pernyataan kuesioner untuk mempermudah responden dalam memahami pernyataan.

2. Variabel Independen

a. Kapasitas Aparatur Desa

Kapasitas adalah sebuah kemampuan dari manusia, organisasi dan masyarakat dalam mewujudkan kinerja yang baik untuk mengidentifikasi dan meraih tujuannya demi perubahan apabila dibutuhkan dalam usaha keberlangsungan, pengembangan dengan tujuan memajukan Ubels, dkk (2010). Terkait dengan pengelolaan keuangan desa, kepala desa merupakan perangkat desa yang berperan langsung dalam pengelolaan keuangan desa lebih tepatnya sebagai pemegang kekuasaan atas keuangan desa.

b. Kualitas Pengawasan BPD

Kualitas dari pengawasan merupakan seberapa banyak kebutuhan informasi yang didapatkan mengenai tujuan dari pengawasan tersebut. Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan desa dimana anggotanya merupakan perwakilan dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan dipilih secara demokratis. Dengan mengetahui pengawasan, standarnisasi pengawasan dan hubungan timbal balik yang dilakukan oleh BPDesa dapat menggambarkan kualitas pengawasan BPD.

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi adalah manfaat yang diharapkan oleh pengguna dari teknologi informasi tersebut dalam menjalankan pekerjaannya. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa kepala desa memiliki tugas untuk memanfaatkan teknologi yang tepat guna dalam menjalankan program, prioritas, kegiatan dan kebutuhan dalam pembangunan desa. Terkait dengan pengelolaan keuangan desa, teknologi informasi dapat dijadikan media untuk mempermudah dalam pengelolaan keuangan desa misalnya dalam penyusunan laporan keuangan maupun laporan pertanggungjawaban lainnya.

3. Variabel Intervening

a. Ketaatan Regulasi

Ketaatan regulasi merupakan variabel pemediasi atau intervening dalam penelitian ini. Ketaatan regulasi merupakan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merujuk pada kepatuhan terhadap Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Terdapat empat asas dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu: transparansi, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin. Pengelolaan keuangan desa harus sesuai pedoman yang sudah dijelaskan secara detail dalam Permendagri, pedoman pengelolaan keuangan tersebut diantaranya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *SPSS (Statistical Package for the Social Science)*. Uji statistik yang digunakan adalah dengan menggunakan uji analisis jalur.

a. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah suatu pengujian yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), *standar deviasi*, *maksimum*, *minimum*, dan median.

b. Uji Instrumen Data

a. Uji Validitas

Hasil uji mewujudkan valid menjelaskan bahwa alat bantu *Statistic Bivariate Correlation Pearson*, suatu alat ukur akan dikatakan valid apabila nilai dari *Correlation Pearson* pada *t* hitung lebih dari lebih dari *t* tabel dan nilai signifikan $< \alpha$ atau 0,05.

b. Uji Reliabilitas

Instrumen penelitian dikatakan handal atau dapat digunakan lebih dari satu kali apabila koefisien *cronbach's alpha* > 0,07. Nilai koefisien reliabilitas diatas 0,07 dikatakan baik

c. Uji Asumsisi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factors (VIP)*. Apabila nilai *VIP* > 10 maka dapat dikatakan memiliki interkorelasi antar variabel independen, maka variabel tersebut harus dikeluarkan dari regresi. Begitu sebaliknya, apabila nilai *VIP* < 10 maka tidak terdapat interkorelasi antar variabel independen pada penelitian.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada nilai sig. Apabila nilai sig > *alpha* 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi tidak terkena heteroskedastisitas

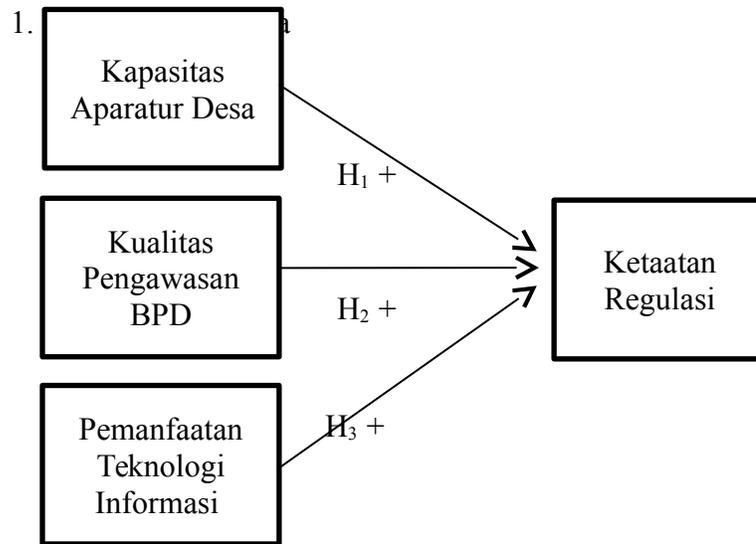
c. Uji Normalitas

Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji *Kolmogorov Smirnov*. Apabila nilai sig yang dihasilkan > *alpha* 0,05 maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal

4. Uji Hipotesis

a. Analisis Jalur (Path Analysis)

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji analisis jalur yang merupakan pengembangan dari analisis regresi berganda. Uji analisis jalur digunakan karena penelitian ini ingin menguji ada atau tidaknya pengaruh tidak langsung dari variabel bebas kepada variabel terikat melalui variabel intervening. Persamaan regresi pada penelitian ini yang menggunakan analisis jalur adalah sebagai berikut:

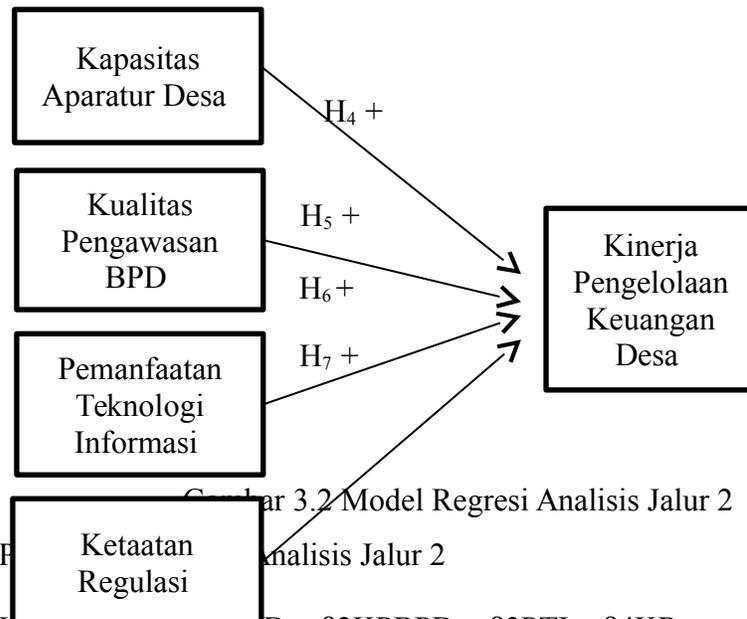


Gambar 3.1 Model Regresi Analisis Jalur 1

Persamaan Regresi Analisis Jalur 1

$$KR = \alpha_1 + \beta_1 KAD + \beta_2 KPBPDP + \beta_3 PTI + e \dots (i)$$

2. Persamaan Kedua



Gambar 3.2 Model Regresi Analisis Jalur 2

Persamaan Regresi Analisis Jalur 2

$$KPKD = \alpha_2 + \beta_1 KAD + \beta_2 KPBPDP + \beta_3 PTI + \beta_4 KR + e \dots (ii)$$

Keterangan :

KAD = Kapasitas Aparatur Desa

KPBPDP = Kualitas Pengawasan BPD

PTI = Pemanfaatan Teknologi Informasi

KR = Ketaatan Rregulasi

KPKD = Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

α = konstanta

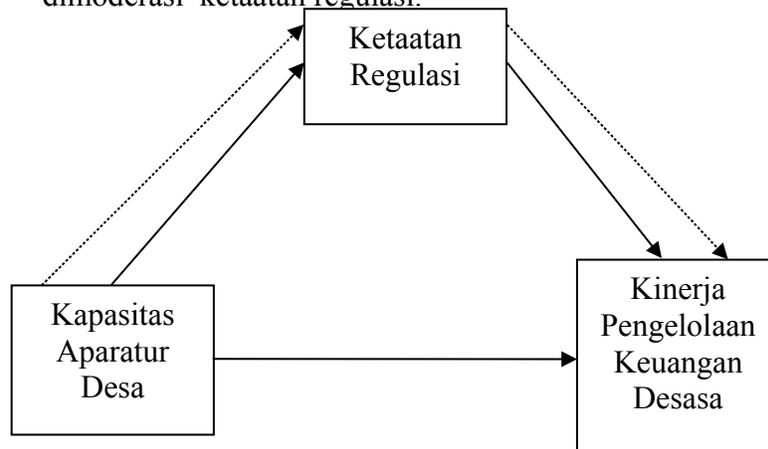
β = koefisien regresi

e = *error*

5. Uji Intervening

Uji intervening digunakan untuk menguji hipotesis 8, 9 dan 10.

a. Untuk menguji hubungan variabel independen kapasitas aparatur desa dengan variabel dependen kinerja pengelolaan keuangan desa dengan dimoderasi ketaatan regulasi.

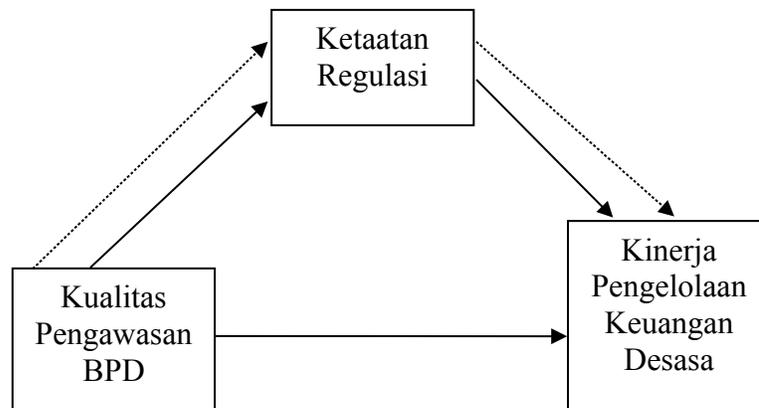


Gambar 3.3. Model Regresi Analisis Jalur 3

Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk diterimanya penurunan hipotesis 8, yaitu :

- Hipotesis 1 dan hipotesis 7 diterima
- $H1 * H7 > H4^2$

b. Untuk menguji hubungan variabel independen kualitas pengawasan BPD dengan variabel dependen kinerja pengelolaan keuangan desa dengan dimoderasi ketaatan regulasi.

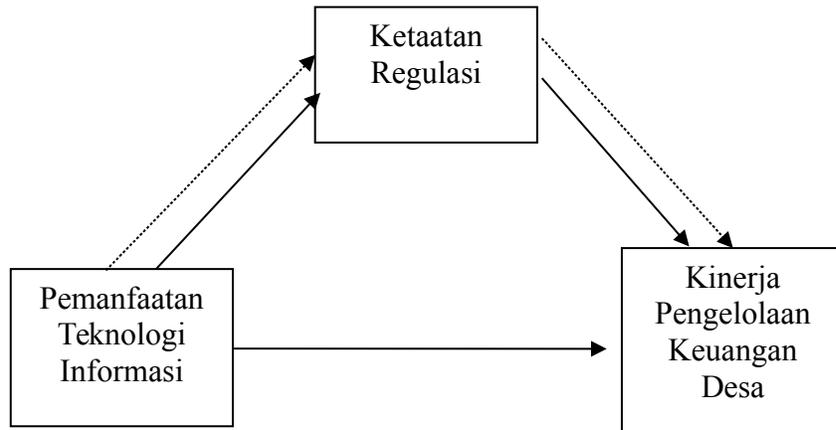


Gambar 3.4. Model Regresi Analisis Jalur 4

Terdapat dua syarat yang harus terpenuhi untuk diterimanya penurunan hipotesis 7, yaitu :

- Hipotesis 2 dan hipotesis 7 diterima.
- $H2 * H7 > H5^2$

c. Untuk menguji hubungan variabel independen pemanfaatan teknologi informasi dengan variabel dependen kinerja pengelolaan keuangan desa dengan dimoderasi ketaatan regulasi.



Gambar 3.5. Model Regresi Analisis Jalur 5

Terdapat dua syarat yang harus terpenuhi untuk diterimanya penurunan hipotesis 10, yaitu :

- Hipotesis 3 dan hipotesis 7 diterima.
- $H3 \cdot H7 > H6^2$

6. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Jika dilihat pada tabel ANOVA apabila nilai signifikan $F < \alpha$ 0,05 maka variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

7. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Jika nilai *adjusted R²* bernilai mendekati 1, maka kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat besar dan begitu juga sebaliknya. Jika nilai *adjusted R²* bernilai mendekati 0, maka kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat kecil.

8. Uji Statistik (Uji t)

Uji nilai t digunakan untuk menguji hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 7. Hasil pengujian dapat dilihat dari nilai signifikansi dan nilai *Standardized Coefficients* B. Hipotesis diterima apabila nilai signifikansi $< \alpha$ 0,05 dan koefisien regresinya searah dengan hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Subyek/Obyek Penelitian

Obyek pada penelitian ini adalah desa-desa yang ada di Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Gunung Kidul memiliki 18 kecamatan dan 114 desa. Penelitian ini menggunakan 36 desa di Kabupaten Gunung Kidul sebagai sampel. Berikut ini pada tabel 4.1 adalah informasi mengenai jumlah kecamatan, luas (km²), jumlah desa serta jumlah padukuhan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul.

B. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Pengujian statistik deskriptif ini dilakukan untuk memberikan gambaran secara deskriptif mengenai jumlah sampel penelitian, standar deviasi, maximum, minimum, median dan *mean* aktual (rata-rata aktual) dari masing-masing variabel. Hasil statistik deskriptif variabel dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini :

Tabel 4.4
Hasil Uji Statistik Deskriptif

| Variabel | N | <i>Std. Deviation</i> | Maximum | Minimum | Median | <i>Mean</i> |
|-----------------------------------|-----|-----------------------|---------|---------|--------|-------------|
| Kapasitas Aparatur Desa | 108 | 1,8519 | 25,00 | 17,00 | 21 | 21,48 |
| Kualitas Pengawasan BPD | 108 | 2,8319 | 35,00 | 20,00 | 27,5 | 27,78 |
| Pemanfaatan Teknologi Informasi | 108 | 2,0030 | 25,00 | 18,00 | 21,5 | 21,68 |
| Ketaatan Regulasi | 108 | 2,5274 | 35,00 | 25,00 | 30 | 30,20 |
| Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa | 108 | 2,1275 | 25,00 | 16,00 | 33 | 21,65 |

1. Kapasitas Aparatur Desa

Variabel kapasitas aparatur desa dengan nilai *standard deviation* sebesar 1,8519. Kapasitas aparatur desa memiliki nilai maximum sebesar 25,00 dan nilai minimum sebesar 17,00. Sedangkan untuk nilai median variabel

kapasitas aparatur desa sebesar 21,00 lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) sebesar 21,48.

2. Kualitas Pengawasan BPD

Variabel kualitas pengawasan BPD dengan nilai *standard deviation* sebesar 2,8319. Kualitas pengawasan BPD nilai maximum sebesar 35,00 dan nilai minimum sebesar 20,00. Sedangkan untuk nilai median variabel kualitas pengawasan BPD sebesar 27,5 lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) sebesar 27,78.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Variabel pemanfaatan teknologi informasi dengan nilai *standard deviation* sebesar 2,0030. Pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai maximum sebesar 25,00 dan nilai minimum sebesar 18,00. Sedangkan untuk nilai median variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 21,5 lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) sebesar 21,68.

4. Ketaatan Regulasi

Variabel ketaatan regulasi dengan nilai *standard deviation* sebesar 2,5274. Ketaatan regulasi memiliki nilai maximum sebesar 35,00 dan nilai minimum sebesar 25,00. Sedangkan untuk nilai median variabel ketaatan regulasi sebesar 30 lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) sebesar 30,20.

5. Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Variabel kinerja pengelolaan keuangan desa dengan nilai *standard deviation* sebesar 2,1275. Kinerja pengelolaan keuangan desa memiliki nilai maximum sebesar 25,00 dan nilai minimum sebesar 16,00. Sedangkan untuk nilai median variabel kinerja pengelolaan keuangan desa sebesar 33 lebih besar dari nilai rata-rata (*mean*) sebesar 21,65.

C. Uji Kualitas Instrumen dan Data

1. Uji Validitas

a. Kapasitas Aparatur Desa

Tabel 4.5

Hasil Uji Validitas Kapasitas Aparatur Desa (KAD)

| No | Butir Pernyataan | Nilai <i>KMO</i> | Faktor <i>Loading</i> | Keterangan |
|----|------------------|------------------|-----------------------|------------|
| 1 | KAD1 | 0,739 > 0,5 | 0,679 | Valid |
| 2 | KAD2 | | 0,719 | Valid |
| 3 | KAD3 | | 0,711 | Valid |
| 4 | KAD4 | | 0,657 | Valid |
| 5 | KAD5 | | 0,658 | Valid |

b. Kualitas Pengawasan BPD

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Kualitas Pengawasan BPD (KBPD)

| No | Butir Pernyataan | Nilai <i>KMO</i> | Faktor <i>Loading</i> | Keterangan |
|----|------------------|------------------|-----------------------|------------|
| 1 | KBPD1 | 0,836>0,5 | 0,753 | Valid |
| 2 | KBPD2 | | 0,723 | Valid |
| 3 | KBPD3 | | 0,751 | Valid |
| 4 | KBPD4 | | 0,628 | Valid |
| 5 | KBPD5 | | 0,592 | Valid |
| 6 | KBPD6 | | 0,740 | Valid |
| 7 | KBPD7 | | 0,723 | Valid |

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)

| No | Butir Pernyataan | Nilai <i>KMO</i> | Faktor <i>Loading</i> | Keterangan |
|----|------------------|------------------|-----------------------|------------|
| 1 | PTI1 | 0,786,>0,5 | 0,779 | Valid |
| 2 | PTI2 | | 0,707 | Valid |
| 3 | PTI3 | | 0,792 | Valid |
| 4 | PTI4 | | 0,813 | Valid |
| 5 | PTI5 | | 0,778 | Valid |

d. Ketaatan Regulasi

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Ketaatan Regulasi (KR)

| No | Butir Pernyataan | Nilai <i>KMO</i> | Faktor <i>Loading</i> | Keterangan |
|----|------------------|------------------|-----------------------|------------|
| 1 | KR1 | 0,854>0,5 | 0,748 | Valid |
| 2 | KR2 | | 0,758 | Valid |
| 3 | KR3 | | 0,769 | Valid |
| 4 | KR4 | | 0,648 | Valid |
| 5 | KR5 | | 0,607 | Valid |
| 6 | KR6 | | 0,727 | Valid |
| 7 | KR7 | | 0,753 | Valid |

e. Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

| No | Butir Pernyataan | Nilai <i>KMO</i> | Faktor <i>Loading</i> | Keterangan |
|----|------------------|------------------|-----------------------|------------|
| 1 | KPKD1 | 0,804>0,5 | 0,771 | Valid |
| 2 | KPKD2 | | 0,807 | Valid |
| 3 | KPKD3 | | 0,841 | Valid |
| 4 | KPKD4 | | 0,851 | Valid |
| 5 | KPKD5 | | 0,772 | Valid |

2. Uji Reliabilitas

Tabel 4.10
Hasil Uji Reliabilitas

| No | Variabel | Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> | Keterangan |
|----|-----------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1 | Kapasitas Aparatur Desa | 0,716 | Valid |
| 2 | Kualitas Pengawasan BPD | 0,827 | Valid |
| 3 | Pemanfaatan Teknologi Informasi | 0,833 | Valid |
| 4 | Ketaatan Regulasi | 0,840 | Valid |
| 5 | Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa | 0,866 | Valid |

3. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 4.11
Hasil Uji Normalitas

| <i>One Kolmogorovsmirnov</i> | Nilai Sig | Keterangan |
|------------------------------|-----------|----------------------|
| <i>Asymp.Sig (2-tailed)</i> | 0,350 | Berdistribusi Normal |
| <i>Asymp.Sig (2-tailed)</i> | 0,402 | Berdistribusi Normal |

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.12

Hasil Uji Multikolinearitas Struktur 1

| Variabel | <i>Collinierity Statistic</i> | | Keterangan |
|---------------------------------|-------------------------------|-------|---------------------------------|
| | Tolerance | VIF | |
| Kapasitas Aparatur Desa | 0,710 | 1,408 | Tidak terjadi multikolinearitas |
| Kualitas Pengawasan BPD | 0,915 | 1,093 | Tidak terjadi multikolinearitas |
| Pemanfaatan Teknologi Informasi | 0,762 | 1,312 | Tidak terjadi multikolinearitas |

Tabel 4.13

Hasil Uji Multikolinearitas Struktur 2

| Variabel | <i>Collinierity Statistic</i> | | Keterangan |
|---------------------------------|-------------------------------|-------|---------------------------------|
| | Tolerance | VIF | |
| Kapasitas Aparatur Desa | 0,551 | 1,814 | Tidak terjadi multikolinearitas |
| Kualitas Pengawasan BPD | 0,871 | 1,148 | Tidak terjadi multikolinearitas |
| Pemanfaatan Teknologi Informasi | 0,577 | 1,732 | Tidak terjadi multikolinearitas |
| Ketaatan Regulasi | 0,476 | 2,099 | Tidak terjadi multikolinearitas |

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.14
Hasil Uji Heteroskedastisitas Struktur I

| Variabel | Nilai Sig | Keterangan |
|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| Kapasitas Aparatur Desa | 0,099 | Tidak terjadi heteroskedastisitas |
| Kualitas Pengawasan BPD | 0,402 | Tidak terjadi heteroskedastisitas |
| Pemanfaatan Teknologi Informasi | 0,854 | Tidak terjadi heteroskedastisitas |

Tabel 4.15
Hasil Uji Heteroskedastisitas Struktur II

| Variabel | Nilai Sig | Keterangan |
|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| Kapasitas Aparatur Desa | 0,059 | Tidak terjadi heteroskedastisitas |
| Kualitas Pengawasan BPD | 0,273 | Tidak terjadi heteroskedastisitas |
| Pemanfaatan Teknologi Informasi | 0,685 | Tidak terjadi heteroskedastisitas |
| Ketaatan Regulasi | 0,430 | Tidak terjadi heteroskedastisitas |

4. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Tabel 4.16

Hasil Uji Koefisien Determinasi

| Regresi | R | <i>R Square</i> | <i>Adjusted R Square</i> | <i>Std. Error of the Estimate</i> |
|---------|--------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 0,708 ^a | 0,501 | 0,486 | 0,025 |
| 2 | 0,705 ^a | 0,497 | 0,477 | 1,538 |

b. Uji F

Tabel 4.17
Hasil Uji F

| Regresi | | <i>Sum of Squares</i> | Df | <i>Mean Square</i> | F | Sig. |
|---------|------------|-----------------------|----|--------------------|--------|--------------------|
| 1 | Regression | 0,070 | 3 | 0,023 | 34,777 | 0,000 ^a |

| | | | | | | |
|---|------------|---------|-----|--------|--------|--------------------|
| | Residual | 0,070 | 104 | 0,001 | | |
| | Total | 0,139 | 107 | | | |
| 2 | Regression | 240,488 | 4 | 60,122 | 25,396 | 0,000 ^a |
| | Residual | 243,836 | 103 | 2,367 | | |
| | Total | 484,324 | 107 | | | |

c. Uji Nilai t

Tabel 4.18

Hasil Uji Nilai t

| Regresi | <i>Unstandardized Coefficients</i> | | <i>Standardized Coefficients</i> | t | Sig. | |
|---------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|
| | B | <i>Std. Error</i> | Beta | | | |
| 1 | <i>(Constant)</i> | 0,383 | 0,114 | | 3,346 | 0,001 |
| | KAD | 0,309 | 0,077 | 0,330 | 4,012 | 0,000 |
| | KBPD | 0,103 | 0,058 | 0,130 | 1,790 | 0,076 |
| | PTI | 0,401 | 0,072 | 0,440 | 5,540 | 0,000 |
| 2 | <i>(Constant)</i> | 0,246 | 2,186 | | 0,113 | 0,911 |
| | KAD | 0,381 | 0,108 | 0,332 | 3,524 | 0,001 |
| | KBPD | 0,114 | 0,056 | 0,151 | 2,018 | 0,046 |
| | PTI | 0,180 | 0,098 | 0,169 | 1,842 | 0,068 |
| | KR | 0,204 | 0,085 | 0,242 | 2,394 | 0,018 |

1. Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa Terhadap Ketaatan Regulasi

Pengaturan pengelolaan keuangan desa harus sesuai memenuhi asas-asas sesuai dengan yang tercantum dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 menuntut aparatur desa untuk bekerja sesuai kebijakan dan rencana yang telah dibuat antara pemerintah dan masyarakat sehingga hasil yang diperoleh akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketaatan regulasi menuntut aparatur desa untuk menjalankan pengelolaan keuangan desa dengan baik sesuai dengan peraturan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Hal ini dibuktikan pada penelitian Prasetyo dan Muis (2015) menjelaskan bahwa hasil penelitiannya SDM menjadi faktor kunci krusial dalam keberhasilan pengelolaan keuangan desa.

- 2. Pengaruh Kualitas Pengawasan BPD terhadap Ketaatan Regulasi**
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pengawasan BPD kurang dalam partisipasi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Fenomena yang ada dilapangan Badan Permusyawaratan Desa kurang berpartisipasi dalam pengawasan kegiatan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum maksimal melaksanakan pengawasan sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 dimana tertera bahwa fungsi BPD menjadi perwakilan dari masyarakat itu sendiri belum optimal melakukan perumusan peraturan desa dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat. BPD juga masih minim dalam pengawasan terhadap kinerja dari pemerintah desa termasuk dalam pengelolaan keuangan desa.
- 3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Ketaatan Regulasi**
Hal ini mengungkapkan bahwa semakin tinggi teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam sebuah desa sebagai penunjang bagi pedoman ketaatan regulasi. Menurut Sugiarti dan Yudianto (2017) terdapat empat alasan kenapa organisasi harus menggunakan teknologi informasi di era globalisasi sekarang ini diantaranya dengan adanya peraturan tersebut akan meningkatkan kompleksitas tugas manajemen, pengaruh ekonomi globalisasi, organisasi memerlukan waktu tanggap yang lebih cepat dan adanya tekanan dari persaingan bisnis.
- 4. Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.**

Kewenangan aparatur desa meliputi seluruh kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Jadi sangat perlu adanya

kemampuan, pemahaman dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap aparatur desa. Aparatur desa merupakan peran utama dalam penyelenggaraan pemerintah desa dalam hal ini aparatur desa sebagai *steward* yang memiliki kewajiban dan kewenangan terhadap pekerjaan yang diserahkan kepada mereka oleh masyarakat sebagai prinsipal. Kapasitas dibutuhkan agar aparatur desa dapat memberikan kinerja terbaik, sehingga tujuan dari pengelolaan keuangan desa dapat tercapai sesuai dengan visi dan misi setiap pemerintah desa.

5. Pengaruh Kualitas Pengawasan BPD terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD termuat dalam UU No.6 Tahun 2014 Pasal 61 bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki hak untuk melakukan pengawasan dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa. Fungsi pengawasan BPD membuat aparatur desa untuk lebih transparan dalam menggunakan anggaran keuangannya desa, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penggunaan anggaran dan penyelewengan keuangan desa, sehingga penggunaan keuangan desa dapat bekerja tepat sasaran. Hal ini didukung dengan penelitiannya Mondale, dkk (2017) bahwa pengawasan BPD merupakan salah satu pendukung dan penghambat dalam proses pengelolaan keuangan desa.

6. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

Belum efektifnya sistem informasi kurang memberikan kemudahan bagi pihak pemerintah desa maupun pihak masyarakat sebagai prinsipal dalam mendapatkan atau mengelola laporan mengenai kinerja dari pengelolaan keuangan pemerintah. Pada kenyataannya di lapangan sudah banyak jaringan internet yang dipasang oleh pemerintah desa yang ada di Kabupaten Gunung Kidul akan tetapi aparatur desa belum bisa membuktikan bahwa mereka mampu untuk menghasilkan laporan keuangan desa secara maksimal. Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nurmiati (2017).

7. Pengaruh Ketaatan Regulasi terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Isi

Permendagri tersebut bahwa setiap desa dalam melaksanakan keuangan desa harus menggunakan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Asas-asas pengelolaan keuangan desa digunakan untuk menunjang kelancaran pengelolaan keuangan desa dengan keterbukaan, keandalan, keterlibatan masyarakat sebagai prinsipal sehingga cita-cita dan hak dari masyarakat dapat terpenuhi.

8. Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa melalui Ketaatan Regulasi.

Menurut Eade (1997) kapasitas merupakan suatu pendekatan utama yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan manusia agar dapat menentukan sendiri apa yang berguna bagi dirinya dan prioritas hidupnya serta kemampuan mengorganisir diri untuk melakukan perubahan bagi masa depan. Hal ini didasari oleh pembekalan sebelum bekerja di pemerintahan desa serta mempunyai kemampuan yang bagus, perilaku yang baik serta menerapkan fungsi-fungsi dan pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan antar waktu. Kapasitas aparat desa yang dicurahkan untuk ketaatan regulasi tidak memiliki pengaruh yang besar dalam mewujudkan kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini disebabkan oleh aparat desa yang memiliki kemampuan serta keterampilan yang baiklah memiliki pengaruh besar melalui ketaatan regulasi untuk perwujudan kinerja pengelolaan dana desa di Kabupaten Gunung Kidul.

9. Pengaruh Kualitas Pengawasan BPD terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa melalui Ketaatan Regulasi.

Pada fenomena yang terjadi di lapangan pengawas dari badan permusyawaratan desa tidak melakukan tugasnya dengan benar dan baik. Beberapa dari pengawas kurang memperdulikan kegiatan yang ada dipemerintah desa. Serta kurangnya dedikasi pengawas dari BPD pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa. Yang seharusnya dilakukan oleh pengawas menurut teori sistem pengendalian intern adalah mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi terutama pada pemerintah desa serta berperan aktif dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan pada laporan keuangan desa (*fraud*).

10. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan adanya ketaatan regulasi semakin membuat pemanfaatan teknologi menjadi baik yaitu menjamin kepastian hukum tentang pengelolaan dana desa bagi aparatur desa yang melakukan transaksi secara elektronik terutama pada pengelolaan keuangan desa, mendorong pertumbuhan ekonomi di desa dan adanya peraturan pengelolaan dana desa akan mencegah kejahatan berbasis teknologi informasi terutama pada laporan keuangan desa. Semakin taat pada aturan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa maka teknologi informasi akan memberikan dampak yang efisien dan efektif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa secara kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas.

BAB V

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

A. Simpulan

1. Kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap ketaatan regulasi.
2. Kualitas pengawasan BPD tidak berpengaruh terhadap ketaatan regulasi.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap ketaatan regulasi.
4. Kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.
5. Kualitas pengawasan BPD berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.
6. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.
7. Ketaatan regulasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.
8. Kapasitas aparatur desa tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa melalui ketaatan regulasi.
9. Kualitas pengawasan BPD tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa melalui ketaatan regulasi.

10. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini menggunakan variabel dependen kinerja pengelolaan keuangan desa dan metode penelitian yang digunakan yaitu kuesioner dimana masih sedikit yang melakukan penelitian terkait, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih banyak agar hasil penelitian ini semakin kuat.
2. Dimensi pada variabel kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa pada penelitian ini belum memaksimalkan perannya terhadap peningkatan perwakilan masyarakat secara optimal.
3. Kompleksnya tugas aparatur desa dan keterbatasan waktu penelitian menyebabkan jawaban yang diberikan aparatur desa selaku responden dalam penelitian ini tidak bisa dikontrol secara pasti apakah jawaban responden jujur atau tidak.

C. Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan atau mengganti variabel bebas lainnya yang mungkin memiliki pengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan metode wawancara dalam pengambilan dan penelitian, sehingga data yang didapatkan lebih detail.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan pada pertanyaan kuesioner variabel kualitas pengawasan BPD pertanyaan tersebut ditujukan untuk badan permusyawaratan desa (BPD).

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Jalil, M. 2017. "Persepsi Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus dan Perbandingan Pengelolaan Keuangan di Desa Ngargomulyo, Desa Keningar, dan Desa Dukun Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017)". *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Asrori. (2014). "Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus". *Jurnal Bina Praja*, 6(2), 101-116.
- Antlov, H., A. Wetterberg dan L. Dharmawan. 2016. Village Governance, Community Life, and The 2015 Village Law in Indonesia, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52 (2), 161-183.

- Assauri, S. 2008. *Manajemen Produksi dan Operasi*. Edisi Revisi. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Balemans, A.R.M. 2013. *Quality Supervision*. Sogeti:Worldwide.
- Bodnar, George H and William S Hopwood, 2006. *Sistem Informasi Akuntansi*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Brown, Lisanne., LaFond, Anne., & Macintyre., Kate. (2001). *Measuring Capacity Building*. Carolina Population Centre/University of North Carolina: Chapel Hill.
- Dale, M. 2003. *Developing Management Skill* (Terjemahan). Jakarta: PT. Gramedia.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Menurut Kabupaten/Kota*.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). "Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns". *Australian Journal of Management*, 16(1), 49-64.
- Dwipayana, A., & S., E. (2003). *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: Ires Perss.
- Eade .(1997). *Capacity Building an approach to People-Centered Development*, Oxford, UK : Oxform GB.
- Galih Prasetyo, A., & Muis, A. (2015). "Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi". *Jurnal Desentralisasi*, 13(1), 16-31.
- Grindle, Merilee S. (1997). *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries*, Boston, MA: Harvard Institute for International Development.
- Hanafi Adha, A. (2016). "Pengaruh Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu". *Jurnal Online Mahasiswa*, 3(2), 1-5.
- Husna, S., & Abdullah, S. (2016). "Kesiapan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie)". *Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1 (1), 282-293.
- Informasi Seputar Kependudukan, Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta, <http://gunungkidulkab.go.id/D-74db63a914e6fb0f4445120c6fa44e6a-NR-100-0.html>. Diakses pada tanggal 24 Februari 2019 Pukul 13.30 WIB.
- Johannessen, J., Arild, (1994) "Information Technology and Innovation: Identifying Critical Innovation Factors", *Information Management & Computer Security*, Vol. 2 Issue: 2, pp.4-9,

- Kaciak, G., R., 2013, Pengertian dan Definisi Teknologi Informasi, <https://dosen.gufron.com/artikel/pengertian-dan-definisi-teknologi-informasi/1/>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2018 Pukul 15.00 WIB.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2012). Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Alfatih
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2018, Akumulasi Penyaluran Dana Desa 2018 <https://www.kemenkue.go.id/publikasi/berita/akumulasi-penyaluran-dana-desa-hingga-tahun-2018-tahap-2-mencapai-rp149-31-triliun/>. Di akses pada tanggal 5 oktober
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2015). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Islami, (2016). “Kapasitas Aparatur Desa dalam Tertib Administrasi Desa (Studi Kasus di Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)”. *Universitas Lampung*.
- Kieso, E. D., Weygand, Jerry, J., Warfield, & D. T. (2007). *Akuntansi Intermediate (Kesepuluh)*. Jakarta: Erlangga.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). “Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo”. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, Vol 8, No, 106-115.
- Mangkunegara, A. A. A. P., 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- McKinsey & Company. (2001). *Effective Capacity Building in Non Profit Organizations*. Venture Philanthropy Partners.
- Moehariono. (2012). *Perencanaan, Aplikasi & Pengembangan Indikator Kinerja Utama Bisnis dan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mondale, T. F., Fahlevi, H., & Aliaman. (2017). “Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah)”. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 196-212.
- Munti, F., & Fahlevi, H. (2017). “Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh”. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 18(2), 172-182.
- Nazaruddin, I., & Tri Basuki, A. (2017). *Analisis Statistik dengan SPSS*. Yogyakarta: Danisa Media.
- Nurillah, A.S. (2014). “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok)”. *Universitas Diponegoro*.

- Nurmiati. (2017). "Efek Moderasi Good Governance Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangkep". *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 7(2), 230-244).
- Nurzianti, R., & Anita. (2014). "Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Besar". *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 1(1), 58-71.
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015.
- Permendagri No.113 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pertiwi, E.R. & Rahayu, Y. 2017. 'Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Alokasi Belanja Daerah'. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 6, No. 11.
- Rafar, T. M., Fahlevi, H., & Basri, H. (2015). "Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara)". *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 4(2), 64-71.
- Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Robbins SP, & Judge. (2007). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Romney, Marshall B & Paul John Steinbart, (2011), "*Accounting Information System*", 9th Edn. (Diterjemahkan oleh Dewi Fitriyani dan Deny Arnos Kwary). Sistem Informasi Akuntansi Edisi 9, Salemba Empat, Jakarta.
- Simbolon, & Maringan, M. (2004). *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sinambela, & Poltak, L. (2010). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Soeprapto, H. R. R. 2003. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi Pembangunan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Sugiarti, E., & Yudianto, I. (2017). "Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei pada Desa-desanya di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya)". *Universitas Widyatama*.
- Suryadi, D. (2016). "Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang)". *Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*.
- Suryokoco. 2010. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa. Melalui <https://suryokocolink.wordpress.com>
- Suwondo, L., M. Paramitha, dan D. Tjahjanulin. 2013. Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Rangka Otonomi Desa (Studi di Desa Gulun, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, *Jurnal Administrasi Publik*, 1(4), 91-100.

- Ubels, J., Acquanye Baddoo, N.-A., & Fowler, A. (2010). *Capacity Development in practice*. London: Earthscan.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Desa.
- Wibowo. 2011. Manajemen Perubahan. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Wijana, Nyoman. 2007. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengaruhnya pada Kinerja Individual pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabanan. Jurnal. *Universitas Udayana*: Bali.